

Judul : RUU PPRT Tertahan di Meja Puan
Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

RUU PPRT Tertahan di Meja Puan

Beleid ini memberikan nilai lebih pada pemerintah Indonesia untuk membangun diplomasi dalam perlindungan pekerja migran di luar negeri.

DINDA SHABRINA
dinda@mediaindonesia.com

RANCANGAN Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sampai saat ini masih tertahan di meja pimpinan DPR. Naskah RUU itu tidak akan bergerak jika pimpinan DPR tidak mengusulkan untuk dirapatkan di Badan Musyawarah untuk selanjutnya disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR.

"Harusnya segeralah, pimpinan kita itu, segera dirapatkan di Badan Musyawarah (Bamus). Diserahkan ke Alat Kelengkapan Dewan (AKD) mana, misalnya. Kalau biasanya ke AKD yang mengusulkan. Konteksnya begitu," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya ketika dihubungi, kemarin.

Beleid menyangkut perlindungan terhadap sedikitnya 4 juta orang pekerja rumah tangga itu sudah diajukan sejak 2004. Sebelum diputuskan menjadi inisiatif DPR pada 21 Maret 2023, RUU PPRT ini juga sempat tertahan selama 3,5 tahun di meja pimpinan DPR.

Oleh karena itu, Willy berharap ada inisiatif dari Ketua DPR RI Puan Maharani untuk segera mendelegasikan ke Badan Musyawarah.

"Sekarang itu tinggal didelegasikan saja ke Bamus. Kalau diserahkan ke pengusul, juga lebih cepat sebenarnya. Harus dibamuskan kalau bisa segera karena surat presiden (supres) dan daftar inventarisasi masalah (DIM)-nya sudah lama masuk," kata Willy.

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan sampai saat ini masih belum mendapatkan jadwal pembahasan RUU PPRT bersama DPR. Padahal, pihaknya sudah mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU PPRT kepada DPR pada 16 Mei 2023 lalu yang mencakup 367 DIM terdiri atas 239 DIM batang tubuh dan 128 DIM penjelasan.

"Kami menunggu jadwal pembahasannya dari DPR," ujar Anwar.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan mengatakan pihaknya mendukung agar RUU PPRT segera disahkan. Bahkan ia menegaskan, hal ini terus menjadi konsen untuk terus diperjuangkan.

"Justru kita ingin mempersembahkan itu secara paripurna, enggak ada maksud yang lain," kata Arteria, kemarin. Namun, dia menjelaskan diperlukan kajian mendalam terhadap RUU PPRT ini. Dia tak ingin RUU PPRT ini menjadi komoditas politik oleh politisi untuk mendapatkan suara

para PRT pada Pemilu 2024. "Kita ingin membuat undang-undang ini untuk semua dan berlaku mulai saat ini atau kapan pun juga, tujuannya sama, value-nya sama," tuturnya.

Hak asasi PRT

Komnas HAM mendorong DPR untuk segera melakukan percepatan pembahasan RUU PPRT untuk pemenuhan hak asasi bagi pekerja rumah tangga.

"Untuk mendorong agar mekanisme hukum untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi pekerja rumah tangga itu ada di Indonesia," ungkap Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah ketika dihubungi, kemarin.

Lebih lanjut, menurutnya, PRT selama ini sudah sangat lama mengalami pelanggaran HAM. Hal itu terlihat dari sisi kasusnya dan kerugian lain yang dialami oleh PRT.

Anis menambahkan, percepatan pembahasan RUU PPRT menjadi UU ke depannya juga dikatakan akan memberikan nilai lebih pada pemerintah Indonesia dalam hal membangun diplomasi dengan negara lain untuk menegosiasikan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

"Nantinya UU PPRT tidak hanya berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi PRT dalam negeri, tapi juga bisa menjadi alat diplomasi bagi pemerintah dalam menegosiasikan standar perlindungan PMI kita di luar negeri," tandasnya. (Des/X-5)

Pengesahan RUU PPRT masih Mangkrak di DPR

Urgensi RUU PPRT

- Memberikan kepastian hukum kepada PRT dan pemberi kerja
- Mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan terhadap PRT
- Menciptakan hubungan kerja yang harmonis

Kilas Balik Perjalanan RUU PPRT

2004-2009

- Draft RUU PPRT diusulkan Jaringan Nasional Advokasi (JALA) PRT ke DPR dan masuk sebagai Prolegnas

Januari-Mei 2023

- Presiden Jokowi mendesak percepatan pengesahan.
- RUU PPRT menjadi usul inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna Sidang DPR
- Ketua Panitia RUU PPRT Willy Aditya mendesak pimpinan DPR ke MKD karena draft PPRT tidak digubris.
- Kemnaker sudah mengirimkan DIM RUU PPRT yang mencakup 376 DIM

2011-2013

- Anggota Komisi IX DPR melakukan riset ke luar negeri dan uji publik di 3 kota, yaitu Malang, Medan, dan Makassar.
- Draft RUU PPRT diselesaikan oleh Komisi IX DPR dan diserahkan ke Badan Legislasi DPR

2021-2022

- Fraksi NasDem mengusulkan RUU PPRT menjadi hak inisiatif DPR, tetapi belum dibawa ke Rapat Paripurna.
- Pemerintah membentuk gugus tugas percepatan RUU PPRT terdiri atas 8 kementerian/lembaga.

2014-2018

- RUU PPRT hanya mengendap di daftar tunggu Prolegnas

2019-2020

- RUU PPRT menjadi prolegnas prioritas tahunan sejak Willy Aditya menjadi ketua Baleg DPR RI.
- RUU PPRT selesai dibahas di Baleg menjadi draft RUU dan naskah akademik

Sumber: Litbang MK